

Ridwan Kamil Ultimatum Bakal Tindak Pungli PPDB

BANDUNG (IM)- Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun 2023 di Jawa Barat untuk jenjang SMA, SMK dan SLB Tahap I, mulai dibuka pada tanggal 6-10 Juni 2023. Lalu, Tahap dilakukan II pada 26-30 Juni.

Gubernur Jabar, Ridwan Kamil berpesan kepada masyarakat bila masih menemukan praktik pungli pada PPDB 2023 agar segera melaporkannya.

Menurut Ridwan Kamil, walaupun sudah meminimalisir pungli dalam PPDB melalui digitalisasi dan pengawasan ketat, tapi pihaknya akan menindak tegas bila ada yang masih melakukan praktek kotor tersebut. "Saya minta media dan masyarakat laporkan saja kalau dalam PPDB ini masih ada pungli. Zaman sekarang laporkan nanti pasti kita tindak lanjut," ujar Ridwan Kamil. Emil juga mengimbau agar

masyarakat tidak semua mendaftar ke sekolah negeri. Menurutnya, sekolah di negeri maupun swasta sama saja apalagi kini banyak sekolah swasta yang berkualitas dan diperhatikan oleh pemerintah.

"Saya titip tidak mungkin semuanya diterima di negeri sehingga keseimbangan dengan sekolah swasta juga terus kita perhatikan. Yang penting semua anak Jabar harus sekolah, mau di negeri atau swasta sama saja," katanya.

Emil menegaskan, kesuksesan seseorang tidak diukur dari sekolah negeri atau swasta, melainkan dari kerja keras dan takdir masing-masing. "Orang sukses tidak diukur dari (sekolah) negeri atau swasta, tapi dengan kerja keras dan takdirnya masing-masing," kata Emil. **pra**

Biskita di Bogor Tak Gratis Lagi, Bayar Rp4.000 Mulai 20 Mei

BOGOR (IM)- Moda transportasi Biskita Trans Pakuan, yang selama ini dapat digunakan gratis oleh masyarakat, mulai 20 Mei 2023 dikenakan biaya Rp4.000 untuk satu kali perjalanan.

Pemberlakuan tarif dipastikan usai terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 55 tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNPB bersifat Volatil atas Layanan Angkutan Perkotaan dengan Skema Pembelian Layanan (BTS) di Kementerian Perhubungan.

Direktur Angkutan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan, Tatan Rustandi menjelaskan, tarif tersebut berlaku untuk semua golongan penumpang.

Ke depannya, BPTJ akan terus melakukan evaluasi, terutama dalam mengkaji tarif sesuai dengan golongan. Misalnya, pelajar, lansia maupun disabilitas.

"Pemberlakuan tarif integrasi dan tarif khusus itu,

kami masih lakukan kajian dan berkoordinasi dengan stakeholder terkait. Mudah-mudahan dapat segera diimplementasikan," kata Tatan, Rabu (17/5).

Kata dia, metode pembayaran tarif dapat dilakukan menggunakan uang elektronik (e-money). Sehingga, tidak ada transaksi menggunakan uang tunai untuk menikmati Biskita. "Semua pakai kartu e-money," jelasnya.

Menurutnya, Biskita Trans Pakuan, merupakan percontohan skema pelayanan BTS, sebagai strategi Kemenhub dalam menstimulasi penyediaan dan pengembangan transportasi berkelanjutan.

"Diharapkan dengan pemberlakuan tarif Biskita

Trans Pakuan ini dapat memberikan stimulus terhadap pelayanan angkutan umum massal lain di Kota Bogor untuk meningkatkan kualitasnya sehingga tercipta iklim persaingan yang sehat," jelasnya. **gio**

DORONG MASYARAKAT DAN ASN ANTI KORUPSI

Pemkab Bogor dan KPK Akan Gelar Roadshow Bus KPK



Pemkab Bogor dan KPK dorong ASN dan masyarakat anti korupsi.

BOGOR (IM)- Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Burhanudin bersama tim KPK RI serta jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor melakukan rapat persiapan Roadshow Bus KPK 2023, yang berlangsung di Aula Inspektoriat Kabupaten Bogor, Rabu (17/5).

Sekda Kabupaten Bogor, Burhanudin menyatakan terimakasih kepada tim KPK yang telah membuat program Roadshow Bus KPK di Kabupaten Bogor, dan berkenan menyesuaikan jadwal dengan Pemkab Bogor.

"Saya sangat berterima kasih kepada jajaran KPK, selama ini juga kami terus dibimbing oleh KPK. Untuk itu, saya minta kepada para Kepala Perangkat Daerah (PD) tidak mewakili saat menghadiri Roadshow Bus KPK 2023 dilaksanakan," ujar Sekda.

Dalam kesempatan ini dirinya meminta kepada semua pihak untuk kompak. "Tunjukkan bahwa Bogor ini besar dalam kebesaran dan betul-betul sosialisasi itu kita dengarkan dan kita implementasikan," tegasnya.

Selanjutnya, Sekretaris

Inspektoriat Kabupaten Bogor, Makmur mengungkapkan, Roadshow Bus KPK 2023 rencananya akan dilaksanakan pada 4 Juni 2023 bertepatan dengan rangkaian kegiatan Hari Jadi Bogor (HJB) ke 541 tahun 2023.

"Kami juga melibatkan semua Kepala PD, Camat sekitar, PMI, PGRI, organisasi, lintas sektor, pihak BJB dan lainnya. Melalui kegiatan ini kita siapkan secara bersama-sama, agar bisa berjalan dengan maksimal," tuturnya.

Di tempat yang sama, Koordinator Utama Roadshow Bus KPK, Yulianto Sapto Prasetyo menjelaskan, Roadshow Bus KPK merupakan pendidikan anti korupsi yang bertujuan untuk mendorong masyarakat, Aparatur Sipil Negara (ASN) dan semua elemen masyarakat paham dan aware terhadap antikorupsi.

"Kita ingin membangun generasi muda yang paham antikorupsi, makanya kita perlu ada kegiatan yang melibatkan langsung masyarakat. Untuk membangun generasi muda yang lebih baik lagi," tukasnya. **gio**

8 | Nusantara



KEPADATAN KENDARAAN MENUJU PUNCAK BOGOR

Foto udara kepadatan kendaraan saat pemberlakuan rekayasa sistem satu arah menuju jalur Puncak, Gadog, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (18/5). Kepadatan di jalur menuju Puncak Bogor tersebut akibat banyaknya warga memanfaatkan libur panjang akhir pekan yang bertepatan dengan hari Kenaikan Isa Al-Masih dengan berwisata, sehingga Polres Bogor melakukan rekayasa lalu lintas sistem satu arah.

Janda di Kab. Bogor Bakal Melimpah, Pendaftaran Perceraian Naik 3 Kali Lipat

Pengadilan Agama Cibinong mengungkapkan lonjakan pendaftaran gugatan dan berkas perceraian didominasi faktor ekonomi. Dari 100 gugatan yang terdaftar dan hasil sidang, sebagian besar atau 85 persen para pasangan mengaku bercerai karena faktor ekonomi. Selebihnya, bermacam-macam termasuk KDRT, kriminal serta ketidakcocokan satu sama lainnya.

CIBINONG (IM)- Jumlah janda dan duda di Kabupaten Bogor, Jawa Barat nampaknya akan meningkat cukup pesat usai lebaran kali ini. Hal ini karena usai ingar bingar Idulfitri jumlah pendaftaran perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Bogor meningkat hingga mendekati 300 persen atau tiga kali lipat.

Kondisi ini membuat petugas Pengadilan Agama Kabupaten Bogor membatasi pelayanan sidang perceraian hanya sekitar 50 kasus per bulan.

Tingginya jumlah pendaftaran perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Bogor ini sempat viral di media sosial. Akun media sosial undercover.id, mengunggah sebuah video

yang memperlihatkan panjang antrian pendaftaran di PA Cibinong. Bahkan, antrian meluber hingga ke luar kantor. Hal ini terjadi karena meningkatnya jumlah pendaftar perceraian terutama setelah Hari Raya Idulfitri.

Lamanya antrian pendaftaran ini diakui Cici Nuryani (28), salah satu pendaftar layanan di Pengadilan Agama Kabupaten Bogor. Cici mengaku sudah antre mendafar sejak pagi, namun hingga tengah hari masih menunggu giliran dilayani.

"Memang antre lama ya, saya sudah dari pagi tadi. Ini sampai tengah hari masih menunggu dilayani," ungkapnya.

Cici menyarankan petugas membuat daftar tunggu dan kepastian waktu pelayanan sehingga warga bisa menyesuaikan diri dengan waktu pelayanan.

"Kalau ada daftar tunggu

kan kita bisa pergi dulu atau ada aktivitas lain," ungkapnya.

Viral antrian ini diakui oleh pihak di Pengadilan Negeri Agama Cibinong. Humas PA Cibinong, Dadang Karim mengungkapkan pelayanan di PA Cibinong terdiri dari perceraian dan pengurusan surat-surat lainnya. Antrian terjadi terutama saat pintu kantor dibuka. Saat itu, warga yang sudah datang sejak pagi langsung menyerbu ruang tunggu.

"Ada peningkatan, dan terutama pagi hari saat pintu dibuka, warga langsung masuk," ungkap Dadang.

Dadang mengungkapkan peningkatan pendaftaran perceraian banyak terjadi setelah Idulfitri. Tak tanggung tanggung, jika hari hari biasa perceraian mencapai 40 kasus per bulan, kini meningkat menjadi sekitar 100 kasus per bulan atau naik tiga kali lipat.

Pengadilan Agama Cibinong mengungkapkan lon-

jakan pendaftaran gugatan dan berkas perceraian didominasi dipicu faktor ekonomi. Dari 100 gugatan yang terdaftar dan hasil sidang, sebagian besar atau 85 persen para pasangan mengaku bercerai karena faktor ekonomi. Selebihnya, bermacam-macam termasuk KDRT, kriminal serta ketidakcocokan satu sama lainnya.

Pihak PA Cibinong kini membatasi jumlah pendaftar hingga hanya 50 kasus per bulan. Hal ini dilakukan agar para pendaftar bisa terlayani. Dengan jumlah kasus sekitar 50 per bulan saja, hakim bisa bekerja maksimal dalam memeriksa berkas perceraian sehingga sidang tidak berlangsung lama.

"Kan sudah ada surat edaran dari MA untuk kasus perceraian sidangnya tidak boleh lebih dari 5 bulan, sehingga diusahakan sebelum 5 bulan selesai," papar Dadang. **gio**

Pramuka Kwartir Kab. Bogor Ingin Lahirkan Generasi Tangguh dan Pancasilais

BOGOR (IM)- Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Kabupaten Bogor melakukan upacara gelar senja tahap 1 tahun 2023 di Lapangan Tegar Beriman, yang dipimpin langsung oleh Kapolres Bogor, AKBP Iman Imanudin, pada Senin sore (15/5).

Turut hadir dalam Upacara Gelar Senja yakni, Pramuka Kwartir Ranting wilayah 3 yaitu, Pramuka Kwartir Kecamatan Citeureup, Gunung Putri, Jonggol, Sukamakmur, Klapanunggal, Cileungsi, Cariu dan Tanjung Sari.

Kapolres Bogor, AKBP Iman Imanudin mengatakan, bahwa pembinaan dan pengembangan generasi muda bangsa melalui gerakan

Pramuka bertujuan untuk membina anak dan pemuda Indonesia, agar menjadi kader pembangunan yang kuat mental, spiritual, berketerampilan dan berdisiplin serta berjiwa Pancasila.

Untuk itulah, maka proses pembinaannya dilaksanakan dengan berbagai metode dan wadah pembinaan, salah satunya melalui gerakan Pramuka ini. Sebagai upaya untuk menumbuhkembangkan bakat, minat, dan pengetahuan di bidang keterampilan tertentu serta memupuk dari dini semangat patriotisme dan bela negara.

"Untuk itu sesuai tujuan tersebut Gelar Senja Gerakan Pramuka Kabupaten

Bogor dilaksanakan sebagai bentuk membina dan menumbuhkembangkan jiwa bela negara anggota Pramuka agar mampu berperan aktif dalam menangkal efek negatif dari globalisasi dan arus informasi tanpa batas," terang Kapolres Bogor.

Dirinya juga berharap, pelaksanaan gelar senja ini kedepannya dapat melahirkan sosok generasi muda bangsa yang tangguh dan pancasilais, serta mampu memiliki kemampuan keterampilan kepramukaan yang patriot bangsa setia, peduli pada nilai luhur bangsa untuk tetap menjaga utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. **gio**



Kapolres Bogor, AKBP Iman Imanudin dalam Gelar Kwartir Pramuka Tingkat Kabupaten Bogor.

340 Km Jalan di Kab. Bogor Rusak, Plt Bupati Bogor Ambil Respons Cepat

JAKARTA (IM)- Keluhan mengenai jalan rusak tengah menjadi sorotan dalam beberapa bulan terakhir. Setelah sebelumnya Provinsi Lampung, Provinsi Jambi, dan Provinsi Sumatera Utara, kini giliran jalan rusak di tingkat kabupaten/kota, salah satunya adalah Kabupaten Bogor.

Plt Bupati Bogor, Iwan Setiawan telah mengungkapkan 20 persen atau 340 kilometer jalan di daerahnya dalam kondisi rusak. Terkait hal itu, Ketua DPP Bidang Hukum dan HAM Partai Perindo, Tama S Langkun mengatakan, pihaknya mendukung Plt Bupati Bogor yang telah mengambil respon cepat, yang diawali dengan rapat koordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Bogor.

"Mudah-mudahan segala tindakan yang akan diambil bisa tepat sasaran dan menjawab permasalahan yang terjadi," ujarnya.

Selain itu, pihaknya berharap Plt Bupati Bogor memperhatikan beberapa hal dalam menangani jalan rusak itu.

"Pertama, segera menyelesaikan kajian untuk jalan yang rusak. Sehingga mendapatkan informasi yang lebih akurat, mana jalan yang rusak berat, mana jalan yang rusak ringan. Termasuk melakukan identifikasi jalan mana saja yang menjadi tanggung jawab provinsi," kata Tama yang juga Bacaleg DPR-RI Dapil Jabar 5.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Kabupaten Bogor memiliki panjang jalan 1.974 kilo-

meter dengan berbagai tingkatan kewenangan. Rinciannya, jalan nasional sepanjang 117 kilometer, jalan provinsi 107 kilometer, dan jalan kabupaten 1.748 kilometer. Semua bertanggungjawab sesuai dengan porsinya masing-masing.

"Kedua, meningkatkan koordinasi dengan pemerintahan provinsi dan pemerintahan Pusat. Apalagi, Presiden Jokowi berencana mengucurkan anggaran sebesar Rp 32 triliun untuk membenahi 8.000 Km jalan yang rusak di Indonesia," ujar Tama.

Menurutnya, kesempatan ini harus dimanfaatkan oleh Pemkab Bogor. Tentunya dengan catatan apabila anggaran sekitar Rp 330 miliar untuk peningkatan jalan tidak memadai.

"Ketiga, mencari solusi untuk mengurangi faktor penyebab rusaknya jalan. Misalnya menata regulasi termasuk menindak tegas kendaraan-kendaraan yang melebihi muatan. Misalnya truk-truk yang melebihi batas tonase yang diatur dalam Peraturan Kabupaten," ujarnya.

Ia menilai percuma jika jalan diperbaiki, tetapi pengguna jalan yang seperti ini tidak tertibkan. "Terakhir, selain pengelolaan dan pengerjaan perbaikan jalan yang transparan dan akuntabel oleh Pemerintah, kami juga berharap masyarakat berpartisipasi untuk mengawasi dan sama-sama menjaga jalan-jalan yang sudah diperbaiki. Ayo kita rawat untuk kepentingan bersama," tuturnya. **pra**